



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TITIK SUNDARI**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **715965**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.126.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m²/81 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. Tanah Seluas 128 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000
3. Tanah Seluas 118 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 206.500.000
4. Tanah Seluas 381 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 114.300.000
5. Tanah Seluas 1.532 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 306.400.000
6. Tanah Seluas 140 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **416.000.000**

1. MOTOR, HONDA C 100 Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM. SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E. MT.CKD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000



4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA 2.4 Q M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	49.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	226.624.263
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.817.824.263
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.817.824.263

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.